

## PCNU Kabupaten Bogor Dukung PPKM Darurat

**CIBINONG (IM)-** Bupati Bogor, Ade Yasin mengajak semua unsur untuk bersama-sama melaksanakan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang ditunjukkan dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor: 443/355/Kpts/Per-UU/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif melalui PPKM Darurat di Kabupaten Bogor mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

Hal itu juga selaras dengan Instruksi Presiden tentang PPKM Darurat khusus Jawa dan Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Bogor, Ade Yasin secara virtual kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama, pimpinan dan ketua ormas, serta pengurus organisasi lainnya.

Merespon hal itu, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bogor menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penerapan PPKM Darurat baik oleh pusat maupun daerah.

"Kami mendukung penerapan PPKM Darurat baik oleh Pusat maupun Pemkab Bogor, karena selaras dengan salah satu tujuan utama syariat, yaitu proteksi terhadap keselamatan jiwa," ucap Ketua PCNU Kabupaten Bogor, KH Aim Zaimudin kepada wartawan, Selasa (6/7).

Pengasuh Ponpes Al-Fatmiah Jonggol tersebut

juga mendukung pemerintah untuk tidak ragu dalam mengambil kebijakan yang mendorong cepatnya penghentian Pandemi Covid 19.

Karena dalam pandangan agama (Islam), di antara fungsi utama pemerintah adalah memberikan kemaslahatan pada ummat, walaupun mungkin kebijakan itu tidak populer.

"Acuan kebijakan pemerintah adalah kemaslahatan rakyat", sambungnya.

Menurutnya, PPKM Darurat tidak menghalangi ummat untuk ibadah, melainkan hanya memindahkan lokasi ibadah dari masjid atau musala ke rumah. Dan dari berjamaah di masjid ke berjamaah bersama keluarga di rumah.

Tak lupa ia pun mengajak kepada umat Islam agar tidak panik menghadapi situasi pandemi ini. Tetapi juga jangan menganggap enteng. "Menerapkan tawakkal dengan memaksimalkan ikhtiar. Serta memperbanyak doa kepada Allah SWT," papar Kyai Aim.

Memperkuat pernyataan tersebut, Saepudin Muchtar selaku tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor dan juga Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bogor, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut harus kita dukung sebagai ikhtiar yang maksimal dalam menangani pandemi Covid 19.

"Penerapan PPKM Darurat adalah ikhtiar yang maksimal dalam rangka mengendalikan penyebaran wabah Covid 19 di Bumi Tegar Beriman," tukas Gus Udin sapaan akrabnya. ● **gio**

## Varian Delta Sudah Menyebarkan di Kota Bogor

**BOGOR (IM)-** Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi varian delta telah ditemukan di Kota Bogor, bahkan jumlahnya cukup banyak. Dia pun bergerak cepat menangkang penyebarannya.

Bima menyebutkan, Kota Bogor memang sedang darurat Covid-19. Itu menyusul setiap harinya ditemukan 562 kasus positif baru. Dia pun memastikan banyak yang terpapar varian delta.

"Sudah ada di saya datanya varian delta. Ini yang membuat kami harus cepat lagi bergerak. Terutama menyadarkan warga," ungkap Bima di dekat kediamannya atau Pendopo Enam, Selasa (6/7) siang.

Bima melanjutkan, dirinya bergerak cepat mengkampanyekan penggunaan masker ganda bagi masyarakat.

"Varian delta ini menukar ketika makan membuka masker. Ini pendekatan sudah

berbeda. Dahulu klaster 1 dan 2, sekarang klaster menyebar di mana-mana," terangnya.

Bima memastikan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor membentuk relawan pemuda, fokus kepada yang isolasi mandiri (Isoman), karena surveilans dari puskesmas sudah tidak mampu lagi, jumlahnya sudah beda dan darurat.

"Sudah banyak warga yang Isoman dan banyak juga warga yang meninggal saat Isoman. Makanya kami fokuskan, kami akan dibantu dan dibackup diperkuat oleh tim relawan Isoman yang baru tadi pagi dibentuk," tegasnya.

Saat ditanya jumlah varian delta yang terkonfirmasi, Bima enggan menyebutkan jumlah. "Varian delta cukup banyak, tidak akan disebutkan angkanya tapi pastinya cukup banyak di Kota Bogor. Makanya penyebarannya cepat," pungkasnya. ● **gio**

## 46 Tempat Usaha di Kota Bogor Ditindak Langgar PPKM Darurat

**BOGOR (IM)-** Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP menindak 46 tempat usaha yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bogor. Total sanksi denda yang dikumpulkan petugas mencapai Rp7,7 juta.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan, penindakan terhadap tempat usaha yang melanggar aturan itu dimulai sejak pukul 09.00 WIB-pukul 23.00 WIB pada Senin (5/7).

"Sasarannya rumah makan, kafe, resto, warung makan tidak sesuai aturan melayani makan di tempat dan toko non-essensial yang masih buka," kata Agustian, dalam keterangannya, Selasa (6/7).

Adapun 10 ruas jalan yang menjadi titik operasi yakni Jalan Pajajaran, Jalan Dewi Sartika,

Jalan Sawo Jajar, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dadali, Jalan Adna Wijaya, Jalan A. Kolonel Syam, Jalan Pandu Raya, Jalan Siliwangi dan Jalan Bondongan.

"Yang melanggar ada 46 tempat usaha dan yang dikenakan sanksi denda variatif mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 500 ribu. Totalnya Rp7,7 juta," jelasnya.

Tak hanya sanksi denda, petugas juga melakukan penytian sementara beberapa barang milik tempat usaha seperti tabung gas hingga kursi. Kemudian, ada pula tempat usaha nonessensial yang ditutup sementara selama masa aturan PPKM Darurat.

"Ke depannya kami harapkan pelaku usaha ini menaati aturan PPKM Darurat. Semua ini untuk menekan kerumunan yang berpotensi penularan covid-19 khususnya di Kota Bogor," tutup Agustian. ● **gio**



BANTUAN TABUNG GAS OKSIGEN UNTUK KOTA BOGOR

Anggota Satpol PP Kota Bogor bersiap mengangkut tabung gas oksigen untuk RS Lapangan Kota Bogor di Posko Logistik PPKM Darurat, Gedung Wanita, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/7). Pemerintah Kota Bogor mendapatkan bantuan tabung gas oksigen dari pemerintah pusat sebanyak 100 tabung besar berukuran 6 m3 untuk memenuhi tingginya kebutuhan bagi pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Kota Bogor.

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## POSKO LOGISTIK PPKM DARURAT DI KOTA BOGOR

Anggota BPBD Kota Bogor menata bantuan sembako beras di Posko Logistik PPKM Darurat, Gedung Wanita, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/7). Posko Logistik yang didirikan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor tersebut untuk mencari dan mengumpulkan bantuan logistik dari para donatur yang akan didistribusikan ke Kelurahan, RW dan RT untuk warga yang terdampak PPKM Darurat dan pasien Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.

## Bupati Bogor Minta Warga Kurangi Mobilitas

Dengan tingginya kasus harian Covid-19, Bupati Ade Yasin meminta masyarakat segera melapor ke Satgas Covid-19 tingkat desa/kelurahan atau tingkat RW, terutama bagi mereka yang merasakan gejala. "Ini supaya cepat ditangani. Karena virus yang sekarang lebih cepat penularannya dan makin cepat dalam memperburuk kesehatan," kata Ade.

**CIBINONG (IM)-** Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, belum bisa mengu-

rangi tingkat keterpaparan akan Covid-19 di Kabupaten Bogor. Pasalnya, dalam dua hari terakhir warga terkonfirmasi positif terus meningkat. Dari data hasil monitoring yang dilansir Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, pada Minggu (4/7) tercatat 249 orang terkonfirmasi positif. Kasus kemudian bertambah pada Senin (5/7) di mana 309 orang terkonfirmasi positif.

Sementara pada Jumat (2/7) atau sehari sebelum PPKM Darurat berlaku, kasus baru konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 248 orang. Bupati Bogor, Ade Yasin pun

masih berharap PPKM Darurat dapat menekan penyebaran virus ini.

"Alhamdulillah yang nongkrong-nongkrong sudah mulai jarang. Tapi ya memang kasus masih terus bertambah. Saya masih berharap masyarakat dapat mengurangi mobilitas dan tidak keluar rumah jika tidak penting," kata Ade Yasin, Selasa (6/7).

Dengan tingginya kasus harian, Ade meminta masyarakat segera melapor ke Satgas Covid-19 tingkat desa/kelurahan atau tingkat RW, terutama bagi mereka yang merasakan gejala.

"Supaya cepat ditangani. Karena virus yang sekarang lebih cepat penularannya dan makin cepat dalam memperburuk kesehatan," kata Ade.

Hingga Senin (5/7) Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat kasus positif menyentuh 22.051 orang. Dari jumlah itu, 19.942 orang dinyatakan sembuh dan 147 orang meninggal dunia. Sementara konfirmasi aktif tercatat 309 orang.

Diketahui, PPKM Darurat berlaku selama 17 hari pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali yang dianggap memiliki kasus penularan sangat tinggi di Indonesia. ● **gio**

## Sektor Pendidikan Tinggi Jadi Prioritas Vaksin Covid-19

**BANDUNG (IM)-** Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari memantau pelaksanaan vaksinasi massal yang diselenggarakan pada kampus-kampus.

Salah satu kampus yang bekerjasama ialah Institut Teknologi Nasional (Itenas). Khususnya kampus tersebut bekerja sama dengan puskesmas dan kecamatan setempat dengan menyelenggarakan vaksinasi massal sebagai bentuk upaya dukungan terhadap program pemerintah untuk percepatan vaksinasi dalam penanggulangan Covid 19.

"Ini berlaku bagi masyarakat yang mendaftar. Paling tidak bisa dimanfaatkan warga kampus dan lingkungan terdekat," ujar Ineu di Itenas, Jalan PIH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (6/7).



Pemantauan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat di Itenas, Jalan PHH Mustofa Kota Bandung untuk memantau vaksinasi massal yang diinisiasi kampus dan puskesmas serta kecamatan Saetempat. Selasa, (6/7).

Teh ineu (Sapaan akrabnya) mengucapkan penenangan dan penanggulangan Covid 19 dapat dilakukan secara masif pada semua sektor. Hal ini menun-

jukkan sinergitas antar institusi termasuk juga kampus-kampus.

"Ini salah satu bukti sinergitas antar Dinkes, Kecamatan dan Kesdam Kota Bandung," ucapnya.



IST

Untuk target idealnya, lanjut Ineu, itu dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Tetapi paling tidak, saat ini yang menjadi sasaran vaksin ialah

komponen kampus itu sendiri. "Kami tentunya kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan di setiap kampus di Jawa Barat," tutupnya. ● **lys**

## Bupati Ade Yasin, Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat Secara Virtual

**BOGOR (IM)-** Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, kemarin.

Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga koordinator pelaksana kebijakan PPKM Darurat.

Dalam Rakor tersebut, Luhut menjelaskan, untuk mengukur efektifitas kinerja kita dalam menerapkan PPKM Darurat di daerah masing-masing, kami menggunakan alat ukur indeks mobilitas masyarakat. Penurunan angka kasus bisa terjadi jika ada penghentian aktivitas masyarakat hingga 50 persen.

"Berdasarkan analisis historis dibutuhkan penurunan mobilitas hingga 30 persen, untuk menurunkan jumlah penambahan kasus, itu untuk Covid-19 varian alpha. Kalau untuk varian delta dibutuhkan hingga 50 persen. Mobilitas masyarakat paling berpengaruh, jadi saya mohon kita semua memahami anatomi masalah. Dengan memahami ini, kita akan tahu cara kerja kita

harus bagaimana," kata Luhut. Luhut meminta, untuk melaksanakan PPKM Darurat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak berhasil artinya kita tanpa sengaja bisa menambah orang yang meninggal atau membiarkan orang meninggal yang mungkin ada di sekitar kita. Bisa saudara, teman, keluarga atau bahkan kita sendiri.

"Para pejabat daerah bisa menjadikan indeks mobilitas ini sebagai acuan untuk mengukur kinerja kita, semua. Kapolres, Dandim, Kapolda dan Pangdam bisa melihat daerahnya masing-masing dari indeks mobilitas masyarakat ini. Dengan target menurunkan mobilitas masyarakat sebanyak 50 persen, kita berharap tanggal 20 Juli nanti bisa mulai kembali," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin memaparkan, Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 5,5 juta jiwa ini butuh perhatian khusus. Jumlah tertular di Kabupaten Bogor sejak 2019 sampai hari ini sebanyak 21.742 kasus. Per hari ini, sekitar 200-an kasus. Kita punya 29 rumah sakit baik RSUD maupun swasta, dan 101 Puskesmas.

"Untuk penanganan Covid di rumah sakit tersedia tempat

tidur sebanyak 1.821 dan ICU sebanyak 142. Tempat tidur yang sudah terpakai sebanyak 1.781 dan ICU 131. Kami juga memiliki pusat isolasi di Kecamatan Kemang dan Megamendung dengan jumlah tempat tidur sekitar 140, sudah terpakai 60 persen. Jadi untuk keterisian ICU sudah 92 persen dan tempat tidur sudah 94 persen. Nakes yang terpapar totalnya 396 dari seluruh rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya," papar Ade.

Ade menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama pada titik penekatan. Kami memberlakukan penekatan akses wilayah menjadi tiga ring. Ring pertama adalah pusat wisata, ring kedua adalah pusat kota, dan ring ketiga adalah batas wilayah.

"Untuk batas wilayah, Kabupaten Bogor yang paling banyak dengan 12 batas wilayah dengan kota dan kabupaten lain, sehingga tugas penekatan batas wilayah dibagi menjadi tiga shift, dan tugasnya gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD dan semua petugas yang kami tugaskan. Kita putar balik-kendaraan di luar Bogor, untuk mempercepat penekatan," papar Ade. ● **gio**

## Bupati Bogor Optimalkan PPKM Darurat dengan Penyekatan di Tiga Ring

**BOGOR (IM)-** Bupati Bogor Ade Yasin sangat ketat dalam menjalankan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat selama dua minggu 3-20 Juli 2021 mendatang. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Ade Yasin dalam memerangi virus Covid-19 akhir-akhir ini yang penyebarannya semakin mengkhawatirkan di berbagai daerah termasuk di Bogor.

Oleh karena, untuk mengoptimalkan PPKM darurat, Bupati Bogor melakukan langkah tiga ring penyekatan yakni perbatasan kota, tempat wisata dan 9 titik penyekatan di daerah perbatasan Kabupaten Bogor. "Penerapan PPKM tiga ring agar dilakukan penyekatan, antara lain di perbatasan wilayah, tempat wisata, dan 9 titik perbatasan seperti Kabupaten Bogor dengan Sukabumi, Cianjur, Bekasi dan Jakarta," kata politisi PPP, seuai benak keterangan melalui live salah satu teve swasta, baru-baru ini.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya dan Kota Bogor dalam penerapan PPKM Darurat ini sama, bersifat hanya copy paste aturan yang ada di Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat. Karenanya, tidak ada tawar menawar apa yang ada di Instruksi Mendagri semua ditaati, patuhi dan laksanakan, dan sudah jadi Keputusan Bupati yang sudah diinformasikan kepada masyarakat dan para pengusaha untuk masing-masing menjaga wilayah.

Menurut Ade Yasin, penyekat juga dilakukan di jalur alternatif salah satunya di jalan alternatif Bukit Pelangi Sentul. Bahkan tadi pagi saat ia bersama Kapolres dan Dandim melakukan monitoring di kawasan itu terdapat sekitar 500 kendaraan

plat B yang berhasil diputar balik. "Pagi tadi kita monitoring ke Wilayah Selatan Puncak seperti Masjid At-ta'awun, Taman Safari, Cimory Riverside, Rumah Makan Alam Sunda, Gunung Gelulis dan penyekatan di Bukit Pelangi ke Sentul, ternyata banyak kendaraan lewat situ, kendaraan selain F kita langsung putar balik tidak lagi ditanya surat antigen dan lain-lain tetapi kita langsung putar balik. Kita juga sudah imbau kepada masyarakat tidak boleh ada yang membuka jalur alternatif. Untuk wilayah Puncak cukup lengang artinya informasi yang diberikan pemerintah sampai ke masyarakat," tegasnya.

Diinformasikan, dirinya pada Senin mendatang akan melakukan pemantauan ke stasiun Kereta Listrik (KRL) untuk menghindari adanya kerumunan.

"Kita akan pantau kalau hari Senin kereta masih ramai berarti masih ada kantor yang masih buka di Jakarta, karena warga kami juga cukup banyak yang bekerja di Jakarta menggunakan moda transportasi KRL. Sebetulnya ketika kantor esensial melakukan WFH 100% maka penumpang KRL juga akan berkurang," ungkapnya.

Ade Yasin mengatakan, untuk memudahkan panyaringan penumpang KRL, dirinya meminta agar masyarakat yang bekerja di perkantoran esensial memberi tanda pengenalan. "Jika tidak penting dan bukan pekerja di perkantoran esensial sebaiknya ditunda melakukan perjalanan dengan KRL. Dengan itu akan memudahkan kami dalam melakukan panyaringan penumpang di stasiun," tukasnya. ● **gio**